

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM AKSELERASI DI MADRASAH ALIYAH UNGGULAN AMANATUL UMMAH PACET MOJOKERTO

Barnoto

Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Indonesia

E-mail: barnoto1966@gmail.com

**Abstract:** *The focus of this study is the policy of accelerated programs in Madrasah Aliyah (MA) Amanatul Ummah Mojokerto that facilitates very smart children or talented children. The results of the study are as follows: (1) the program is conducted through socialization, coordination and consultation, while the models of policy plans are deliberative and strategic models; (2) the policy of accelerated programs in MA Amanatul Ummah Mojokerto are implemented by appointing an implementation team and applying a strict recruitment system for acceleration class. The pattern of building an institution brand image through the accelerated program is performed by the kiai and headmaster as a public figure; (3) evaluation of the policy is carried out externally by the Ministry of Religious Affairs at provincial and district levels, whose duty is to supervise and facilitate the implementation of the program, while internal evaluation is performed by the staffs and coordinators who directly conduct evaluation in the field. The types of evaluation of the accelerated program consist of result evaluation and process evaluation.*

**Keywords:** *policy; acceleration programs; Islamic educational institution.*

## Pendahuluan

Dalam era global Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu desentralisasi atau otonomi daerah yang saat ini sudah berlangsung, dan era globalisasi total (*total globalization*) tersebut akan terjadi pada 2020. Tantangan yang besar sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhaimin<sup>1</sup> sebagai ujian berat yang harus dilalui dan dipersiapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Artinya bangsa Indonesia harus mampu melakukan persaingan dengan negara-negara lain dalam bidang pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas akan melahirkan manusia-manusia unggul yang memiliki nilai tambah (*added value*), dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain dan

---

<sup>1</sup>Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 89.

bangsa lain didunia, sehingga kita bisa bersanding dan bersaing, bahkan bertanding dengan negara asing, negara maju sekalipun sehingga kita bisa memasuki era globalisasi dengan nyaman, sekaligus mewujudkan *Millenium Development Goals* (MDGs), dan visi 2030 untuk menjadi Negara lima besar dunia.<sup>2</sup>

Selama ini, strategi penyelenggaraan pendidikan kita masih bersifat klasik dan massal, serta memberikan perlakuan yang standar (rata-rata) kepada semua siswa, padahal setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda serta tingkat kecerdasan yang berbeda-beda pula. Akibatnya, siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di bawah rata-rata, karena memiliki kecepatan belajar di bawah kecepatan belajar siswa lainnya, akan selalu tertinggal dalam mengikuti kegiatan belajarmengajar; sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata, karena memiliki kecepatan belajar di atas kecepatan belajar siswa lainnya, akan merasa jenuh, sehingga sering berprestasi di bawah potensinya (*under achiever*).<sup>3</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ablard, dkk (1994) menemukan bahwa sebagian besar siswa cerdas merasakan bahwa program akselerasi memberikan dampak positif. Materi pelajaran yang menantang meningkatkan minat belajar siswa sehingga kemajuan belajarnya menjadi lebih cepat. Hasil penelitian yang sama yang dilakukan Brody, dkk (1988) menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa yang mengikuti program akselerasi saat di SMA, secara mencolok mencapai hasil yang memuaskan baik secara akademik maupun sosial.

Namun demikian, program akselerasi mempunyai dampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional siswa. Secara sosial mereka merasa waktu istirahat dan bermainnya kurang, tidak memiliki teman, dikucilkan oleh teman lain dan dimusuhi oleh kakak kelasnya. Sedangkan secara emosional yaitu munculnya kekhawatiran atau takut bila mendapatkan nilai buruk dan merasa malu jika nanti nilainya lebih jelek dibandingkan dengan teman-temannya yang berada di kelas reguler.<sup>4</sup> Kolesnik (1970) mengemukakan adanya kelemahan program

<sup>2</sup> Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Bandung: Bumi Aksara, 2011), 13.

<sup>3</sup> Novi, "Pola Interaksi Sosial Siswa Kelas Akselerasi", *Jurnal PPKn UNJ Online*, Volume 2, Nomor 4 (2014), 2.

<sup>4</sup> Iwan Wahyu. H. "Hubungan Antara Perfeksionisme dengan Depresi pada Siswa Cerdas Istimewa di Kelas Akselerasi, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol.1, No 2 (Agustus 2012), 101.

akselerasi yaitu (1) dengan loncat kelas akan mengurangi kesempatan siswa untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya; (2) menimbulkan problem sosial dan emosional; (3) beban tugas belajar yang banyak bisa menjadi tekanan (*stressor*) bagi kesehatan mental; (4) kesempatan untuk latihan kepemimpinan berkurang karena masalah fisik dan kematangan sosialnya belum sematang siswa yang lebih tua; (5) melakukan akselerasi dalam perkembangan intelektual, tapi tidak dalam aspek-aspek lainnya<sup>5</sup>

Selain pendapat di atas Gibson (1980) mengatakan bahwa kelemahan utama program akselerasi adalah menyangkut penyesuaian sosial siswa. Pendapat ini juga diperkuat oleh Richardson dan Benbow (1990) yang mengatakan bahwa dampak negatif program akselerasi adalah pada perkembangan sosial dan emosional siswa. Bahkan di Indonesia kenyataan diatas diperkuat oleh kasus yang terjadi di NTB ditemukan siswa depresi bunuh diri karena tidak lulus dari kelas akselerasi. Penyebabnya adalah siswa tertekan karena terlalu giat belajar tapi ketika gagal mereka merasakan sangat gagal dan kekecewaan yang sangat luar biasa.

Penyelenggaraan program akselerasi setidaknya memperhatikan apa yang dikatakan oleh Meier yaitu (1) lingkungan belajar yang positif. Belajar terbaik adalah dalam lingkungan fisik, emosi, dan sosial yang positif, suasana yang tidak tegang dan menstimulasi terjadinya belajar; (2) melibatkan siswa secara total. Artinya siswa secara total terlibat dan aktif serta mengambil tanggungjawab penuh terhadap belajarnya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang diserap siswa secara pasif, tetapi sesuatu yang secara aktif ditemukan sendiri oleh siswa. Oleh sebab itu, program belajar akselerasi cenderung berbasis aktivitas daripada berbasis materi atau ceramah; (3) kolaborasi antar siswa. Umumnya belajar terbaik adalah dalam lingkungan kolaboratif. Aktifitas belajar yang baik adalah belajar bersama dan bekerjasama. Kalau metode pembelajaran konvensional menekankan kompetisi antara siswa secara individual, program akselerasi belajar menekankan kolaborasi antar siswa dalam suatu komunitas belajar; (4) kaya dengan gaya belajar. Belajar terbaik adalah apabila siswa memiliki banyak pilihan atau cara belajar yang memungkinkan mereka menggunakan semua inderanya dalam belajar; (5) belajar kontekstual. Belajar terbaik adalah berada dalam suatu konteks. Faktanya ketrampilan yang

---

<sup>5</sup> Kolesnik, WB, *Educational Psychology*. Second edition (New York: Mc Graw Hill Book Company, 1970), 210.

dipelajari secara terpisah sukar diserap dan cepat terlupakan. Belajar terbaik adalah dengan mengerjakan tugas dalam proses yang terus menerus dengan melibatkan diri dalam kehidupan nyata, mendapatkan umpan balik, melakukan refleksi diri, dan melakukan evaluasi diri.<sup>6</sup>

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, madrasah harus berusaha melakukan reaktualisasi guna meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan dengan indikator-indikator: a) siswa dapat berprestasi dalam menempuh ujian nasional dan lulusan dari madrasah dengan predikat minimal baik, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang unggul/favorit; b) meningkatnya jumlah siswa yang berprestasi di bidang akademik, terutama dalam mengikuti Olimpiade, serta bidang nonakademik (seperti olah raga, seni dan sebagainya) pada tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan/- atau nasional bahkan internasional; c) lulusan madrasah dapat berkompetensi dengan lulusan sekolah umum; dan d) lulusan madrasah dapat memenuhi harapan stakeholders, dapat memenuhi harapan dan kebutuhan orang tua, masyarakat, dunia kerja, pemerintah, dan sebagainya<sup>7</sup>

Kebijakan program akselerasi merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan negara yang memiliki daya saing pada tingkat global. Paparan latar belakang di atas memberikan gambaran bahwa pemerintah memberikan peluang yang besar bagi warga negara Indonesia untuk mengembangkan diri. Jalur pengembangan diri bagi warga Indonesia yang memiliki kemampuan Cerdas Istimewa (CI) dan Bakat Istimewa (BI) diantaranya melalui program akselerasi.

Madrasah Aliyah Amanatul Ummah PP Amanatul Ummah Pacet Mojokerto sebagai penyelenggara program akselerasi, merupakan lembaga pendidikan menengah yang memiliki siswa lebih dari 300 orang. Program akselerasi dimulai pada tahun 2007 yaitu tingkat MTs Amanatul Ummah. Sedangkan MA Amanatul Ummah diselenggarakan pada tahun 2008.<sup>8</sup> Meskipun lokasi yang jauh dari perkotaan namun MA Amanatul Ummah mampu menunjukkan prestasi pada tingkat

<sup>6</sup>Meier, *The Accelerated Learning Handbook* (The Mc Graw-Hill Companies.2000), 200.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 24.

<sup>8</sup> Tawi, *Wawancara*, Pacet, 21 Agustus 2014. Tawi adalah orang terdekat dengan pengasuh Pesantren Amanatul Ummah dan menjabat sebagai kepala Madrasah Excellent di PP Amanatul Ummah yaitu Madrasah Nurul Amanah.

nasional dan internasional. Menurut KH. Asep Saifudin, lulusan MA Amanatul Ummah program akselerasi sampai saat ini sudah diterima di beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia, di ITB, Unair, UI, UIN Syarif Hidayatullah, ITS Surabaya pada fakultas Kedokteran, dan Teknik. Sedangkan di tingkat internasional sudah terdapat lulusan di 10 negara<sup>9</sup>. Program akselerasi ini dikelola dengan dana mandiri, namun secara singkat mampu bersaing dengan lembaga pendidikan sekitarnya.

Kemajuan yang dicapai oleh MA Program akselerasi ternyata mampu memuaskan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) karena memiliki lulusan yang memiliki kompetensi di atas rata-rata. Sebagai indikatornya adalah : (a) hampir semua lulusan MA telah diterima di jurusan favorit pada perguruan tinggi ternama baik negeri maupun swasta, (b) penerima beasiswa Kementerian Agama terbanyak, baik program dalam negeri maupun ke luar negeri, (c) banyak memenangi ajang kompetisi ilmiah dan kesenian di tingkat regional maupun nasional, dan (d) secara rutin mengirimkan siswa mengikuti program *student fellowship* ke berbagai negara.

### Proses Pembentukan Kebijakan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin)<sup>10</sup>. Abidin<sup>11</sup> menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> KH Asep Saefudin, *Wawancara*, Pacet, 21 Agustus 2014. Asep Saifudin merupakan pengasuh PP Amanatul Ummah, sebagai kyai dan *policy center* di PP Amanatul Ummah Pacet dan Surabaya.

<sup>10</sup> Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 75.

<sup>11</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Suara Bebas, 2006), 17.

<sup>12</sup> William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 6.

Dari definisi kebijakan di atas, memberikan makna bahwa kebijakan sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah serta perilaku pada umumnya. Makna kebijakan juga sering dikonotasikan dengan sebagai politik karena membawa konsekuensi politis dan perilaku politik. Dengan makna lain kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru.

Dari definisi di atas maka dapat ditarik beberapa ciri kebijakan publik yaitu : *Pertama*, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Kedua*, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di wilayah lembaga publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu<sup>13</sup>. *Ketiga*, dikatakan sebagai kebijakan publik jika terdapat tingkat eksternalitas yang tinggi, yaitu dimana pemanfaatan atau yang terpengaruh bukan saja pengguna langsung tapi juga yang tidak langsung.

Dengan demikian kebijakan publik memiliki makna “paksaan” yang secara potensial sah bila dilakukan. Sifat memaksa tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta, hal ini memiliki makna bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

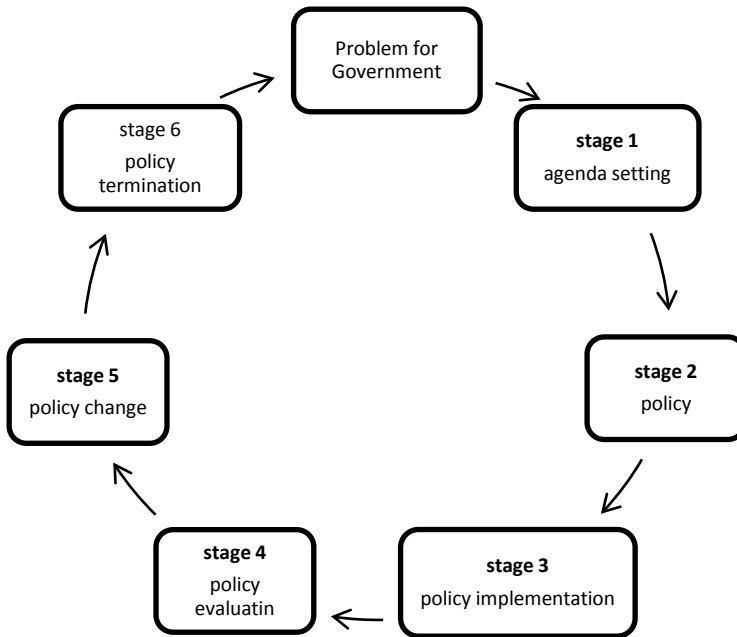
### **Langkah-Langkah Membuat Kebijakan**

Menurut Lester dan Stewart, studi kebijakan publik kini telah meliputi berbagai tahap seperti terangkum dalam lingkaran kebijakan publik (*public cycle*) yang meliputi tahapan yaitu 1) *agenda setting*, 2) *policy*

---

<sup>13</sup>Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan yang Unggul* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 33-34.

*formulation, 3) policy implementation, 4) policy evaluation, 5) policy change, dan 6) policy termination*<sup>14</sup>.



Gambar 1. Policy Cycle<sup>15</sup>

Tahap penyusunan agenda pembuat kebijakan mengumpulkan masalah-masalah publik. Dari masalah publik kemudian dianalisis dan diikuti penyusunan pembuatan kebijakan. Siklus berikutnya ialah menerapkan kebijakan tersebut ke dalam masyarakat, dan diikuti dengan mengevaluasi. Dengan menganalisis hasil evaluasi, maka dibuatlah penyesuaian atau perubahan bagi penyempurnaan policy. Langkah terakhir adalah dari siklus pembuatan kebijakan ialah mengakhiri kebijakan karena tujuan sudah tercapai.

Tahapan pertama: yaitu melakukan penyusunan agenda kebijakan yang akan diberlakukan dengan melihat pada kebutuhan. Para

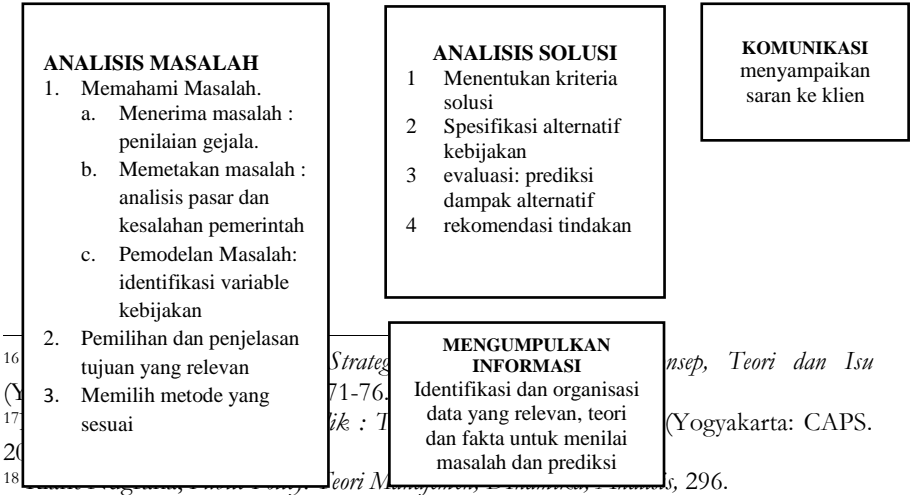
<sup>14</sup>James P Lester and J Stewart, *Public Policy: An Evaluation Approach* (The University of California: Wadsworth Thomson Learning, 2000), 46.

<sup>15</sup> Ibid, 60.

pembuat kebijakan dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda politik. Pada tahap ini setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan: (1) menyepakati kriteria alternative, (2) penentuan alternatif terbaik dengan tujuan agar semua manfaat dan kerugian, kesulitan dan kemudahan, dampak negatif dan positif hasil berupa dapat terungkap, (3) pengusulan alternatif terbaik.<sup>16</sup>

Tahap kedua: formulasi kebijakan yaitu masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah publik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives*) yang ada. Tahap ketiga: adopsi kebijakan yaitu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga dan keputusan peradilan. Tahap keempat: implementasi kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia<sup>17</sup>. Tahap kelima: evaluasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat keberhasilan dari kebijakan yang telah dibuat.

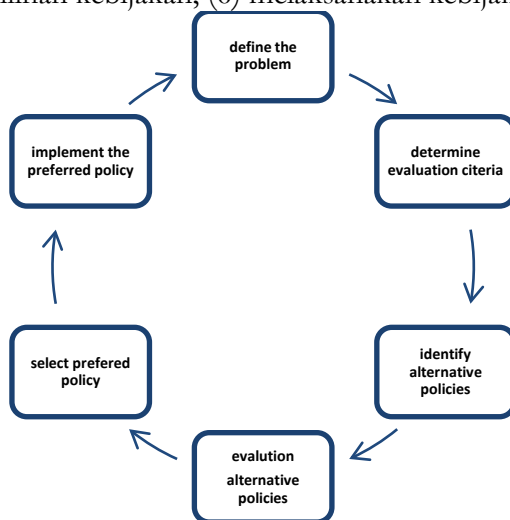
Selain model kebijakan Dunn dan Sterwart, yaitu teori yang dikembangkan oleh Weimar-Vining dimana langkah-langkah kebijakan yang perlu diperhatikan adalah *framing*. Dimana metode framing yang fokus kepada dua kemungkinan akar masalah, apakah *government failure* atau *market failure*.<sup>18</sup>





Gambar 2. Model Kebijakan Weimar-Vining

Ada juga model *policy making process* yang diungkapkan oleh Shafritz dan Russel<sup>19</sup> yang terdiri dari (1) agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) implementasi, (4) evaluasi program dan analisis dampak, (5) *feedback* yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Bagi Patton & Sawicki<sup>20</sup> proses kebijakan setidaknya harus melakukan yaitu diawali dengan (1) mendefinisikan masalah yang muncul, (2) menentukan kriteria, (3) melakukan identifikasi kebijakan alternatif, (4) melakukan evaluasi kebijakan alternatif, (5) melakukan pemilihan kebijakan, (6) melaksanakan kebijakan.



Gambar 3. Proses Kebijakan Patton &amp; Sawicki

Proses pembuatan keputusan yang dipilih oleh para pembuat keputusan menganut model rasional, inkremental, sistem, *mixed*

<sup>19</sup> Shafritz, J.M and E.W. Russel, *Introduction Public Administration* (New York: Addison Education Publisher Inc), 1.

<sup>20</sup> Ibid, 308.

*scanning*, mereka harus memiliki landasan untuk melakukan pilihan-pilihan tersebut. Artinya para pembuat keputusan harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu untuk menetapkan pendekatan yang dipakai. Beberapa keputusan yang diambil mungkin merupakan hasil kesempatan yang memang ada.

Selain itu keputusan juga bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi para pembuat keputusan. Menurut James Anderson<sup>21</sup> mengungkapkan nilai-nilai yang dapat membantu dalam mengarahkan perilaku pembuat keputusan yaitu: pertama, *Nilai politik*. Pembuat keputusan mungkin menilai alternatif-alternatif kebijakan berdasarkan pada kepentingan partai politiknya beserta kelompoknya. Keputusan yang dibuat didasarkan pada keuntungan politik dengan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan. Para ilmuwan politik sering menggunakan perspektif ini dalam mempelajari dan menilai pembentukan kebijakan. Kedua, *Nilai-nilai organisasi*. Para pembuat keputusan, khususnya para birokrat mungkin dipengaruhi pula oleh nilai-nilai organisasi. Organisasi-organisasi, seperti badan administratif menggunakan banyak imbalan dan sanksi dalam usahanya untuk mempengaruhi anggota-anggotanya menerima dan bertindak atas dasar nilai-nilai organisasi yang telah ditentukan. Ketiga, *nilai-nilai partai*. Usaha untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi atau kedudukan sejarah seorang mungkin pula merupakan kriteria keputusan. Seorang politisi yang menerima suap untuk membuat keputusan tertentu. Keempat, *nilai-nilai kebijakan*. Para pembuat keputusan politik tidak hanya dipengaruhi oleh perhitungan-perhitungan keuntungan, organisasi-organisasi atau pribadi, namun para pembuat keputusan mungkin bertindak dengan baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan mengenai apa yang merupakan kebijakan publik secara moral benar dan pantas. Kelima, *nilai-nilai ideologi*. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran dunia yang disederhanakan dan merupakan pedoman bagi rakyat untuk melakukan tindakan. Kelima nilai di atas akan sedikit banyak berpengaruh pada hasil keputusan. Salah satu nilai yang sangat berpengaruh akan bisa dilihat pada sisi evaluasi kebijakan.

---

<sup>21</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012), 137-138.

Pada sisi yang lain, dampak dari sebuah kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semua harus diperhitungkan dalam evaluasi. *Pertama*, dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang yang terlibat. Dengan demikian, mereka atau individu-individu yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi. *Kedua*, kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. *Ketiga*, kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan masa yang akan datang. *Keempat*, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.<sup>22</sup>

### Pendekatan Implementasi Kebijakan

Menurut Meter dan Horn (Nugroho: 2008) implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Diantara variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah (1) aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi; (2) karakteristik agen pelaksana/ implementor; (3) kondisi ekonomi, sosial dan politik; (4) kecenderungan (*disposition*) pelaksana.

Sedangkan menurut Grindle dalam Wibawa (1994) mengatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementasi dari kebijakan itu yang didalamnya meliputi : (1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) pelaksana program; (6) sumberdaya yang dikerahkan.

Implementasi kebijakan dengan pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional. Menurut Smith dalam Islamy (2001) mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan adalah dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Implementasi kebijakan

---

<sup>22</sup>Ibid., 237-238.

dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu (1) *idealized policy* yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group*. (2) *target group* yaitu bagian dari *policy stake holder* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. (3) *implementing organization* yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan.

### Kebijakan Pendidikan

Kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan beberapa istilah yang hampir memiliki kesamaan. Diantara istilah itu adalah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*). Beberapa istilah di atas memiliki perbedaan dan penggunaan yang berbeda pula. Pengertian tentang kebijakan pendidikan sebagaimana diungkapkan Nugraha<sup>23</sup> yaitu sebagai kebijakan publik yang berkenaan dengan pendidikan. Artinya bahwa kebijakan pendidikan adalah berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang mencakup tujuan pendidikan dan sebagaimana mencapai tujuan tersebut. Sementara Mark Olsen dkk mengartikan kebijakan pendidikan adalah “*Education policy in twenty-first century is the key to global security, sustainability and survival...education policies are central to such global mission...a deep and robust democracy at national level requires strong civil society based on norms of trust and active response citizenship and that education is central to such a goal. Thus, the strong education state is necessary to sustain democracy at the nation level so that strong democratic nation-states can buttress form of international governance.*”<sup>24</sup> Definisi Mark Olsen lebih merujuk pada kebijakan pendidikan menjadi prioritas sebagai ujung tombak suatu negara dalam rangka menghadapi perubahan global. Pengertian di atas menekankan pada strategi kebijakan pendidikan yang lebih unggul. Definisi yang berbeda juga dikemukakan oleh Margaret E Goertz “...peningkatan menekankan pada kecukupan pendidikan dan kepedulian publik atas biaya

<sup>23</sup>Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, 23.

<sup>24</sup>Mark Olsen, John Codd, & Anne Marie O’neil, *Educational Policy: Globalization, Citizenship and Democracy* (London: Sage, 2000), 1-2.

pendidikan yang tinggi merupakan fokus pembuat kebijakan dengan perhatian pada efisiensi dan efektivitas pengeluaran pendidikan”.<sup>25</sup>

Kebijakan pendidikan adalah menyangkut efisiensi dan efektifitas anggaran pendidikan. Artinya kebijakan pada aspek proses dan implementasinya, dimana harus melihat sumberdaya manusia, dana, fasilitas dan manfaat kebijakan. Pendapat Devine yang dikutip oleh Munadi dan Barnawi bahwa kebijakan pendidikan memiliki empat dimensi kebijakan, yaitu dimensi normatif, struktural, konstituentif, dan teknis. Dimensi normatif terdiri atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada. Dimensi tersebut perlu dukungan dari dimensi struktural. Dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah dan satu struktur organisasi, metode dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan. Dimensi konstituentif terdiri dari individu, kelompok kepentingan dan penerima yang menggunakan kekuatan untuk proses kebijakan.<sup>26</sup>

Sementara itu kebijakan pendidikan yang digunakan di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Yoyon yaitu lebih banyak menggunakan model analisis kebijakan politik yang didasarkan pada asumsi-asumsi politis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator-indikator. *Pertama*, ketidakjelasan dalam asumsi-asumsi yang digunakan terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan. Kompleksitas dan heterogenitas, sifat dan situasi yang disebut sekolah selalu diidentikan dengan pendidikan. Sehingga tidak heran manakala membicarakan sistem pendidikan ternyata yang dibahas adalah sistem persekolahan. Menganalisis kebijakan pendidikan yang dianalisis ternyata kebijakan penyelenggaraan persekolahan. Akibatnya paradigma pendidikan yang universal dipandang secara sempit dan lebih banyak adaptif daripada inisiatif. *Kedua*, dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan kurang kontekstual sebagai suatu kebijakan yang utuh dan terintegrasi secara *empirical, evaluative, normative, predictive* yang memberikan pedoman jelas bagi pengejawentahan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Sebagai suatu produk, kebijakan pendidikan tidak diformulasikan berdasarkan elemen-elemen yang perlu diintegrasikan secara “sinergi” bukan sebagai komponen yang

<sup>25</sup>Margaret E Goartz, *The Finance of American Public Education: Challenge of Equity, Adequity and Efficiency*. Dalam Gregory J.C. *Handbook of educational Policy* (San Diego: Academic Press, 2001), 45.

<sup>26</sup>Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan* (Jogjakarta: Arruzmedia, 2011), 19.

“terdikotomi”. Artinya, apakah rumusan-rumusan kebijakan pendidikan tersebut telah memenuhi kriteria kebijakan yang utuh atau masih ada butir-butir yang lepas dari ruang lingkupnya.<sup>27</sup>

### **Perencanaan Kebijakan Program Akselerasi di Madrasah Aliyah Amanatul Ummah Pacet Mojokerto**

Perencanaan pada dasarnya merupakan penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Perencanaan bisa juga diartikan sebagai penentuan cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan meliputi jangka waktu tertentu maupun pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih.

Perencanaan kebijakan penyelenggaraan program akselerasi di Madrasah Aliyah Amanatul Ummah Pacet Mojokerto melalui sebuah proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan didasarkan pada nilai-nilai yang ada di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Perencanaan yang dilakukan merupakan proses untuk mencari alternatif-alternatif dari pilihan yang ada berkenaan dengan program unggulan. Pilihan program akselerasi merupakan pilihan yang telah ditentukan untuk mewujudkan tujuan. Diantara tujuan program akselerasi adalah terwujudnya generasi yang konglomerat, ulama-ulama besar, para pemimpin dan profesional. Untuk mewujudkan tujuan di atas Pondok Pesantren (PP) Amanatul Ummah dalam perencanaan melibatkan *stakeholder*. Proses yang dilaksanakan adalah melakukan analisis dengan melihat kebutuhan sebuah lembaga pendidikan yang mampu mencetak bibit-bibit unggul sebagaimana yang digariskan dalam visi dan misi madrasah.

Perencanaan program akselerasi yang dilakukan lembaga PP. Amanatul Ummah Surabaya melakukan persiapan. Di antara perencanaan yang dilakukan yaitu: *pertama*, melakukan konsultasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Konsultasi dilakukan dengan pihak pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, baik pada tingkat Pusat, Wilayah, Kabupaten dan Kota. Selain dengan pihak pemerintah, juga melakukan konsultasi dengan lembaga pendidikan yang telah

---

<sup>27</sup> Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 45.

menyelenggarakan program akselerasi. Konsultasi dan komunikasi yang dilakukan yaitu dengan SMAN 05 Surabaya. Komunikasi dan konsultasi juga dilakukan dengan Asosiasi Program Akselerasi ditingkat Jawa Timur. Asosiasi Program Akselerasi merupakan wadah bagi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program akselerasi sekaligus sebagai forum pengembangan dan pembinaan SDM.

*Kedua*, membentuk tim kecil program akselerasi yang di dalamnya ada kepala madrasah, wakil kepala, guru yang memiliki kepedulian dan kemampuan untuk memberikan layanan bagi siswa program akselerasi. Tim kecil bertugas melakukan koordinasi kepada semua pihak dalam program akselerasi. Meskipun terjadi pro dan kontra dalam penyelenggaraan MA program akselerasi, dengan alasan eksistensi lembaga pendidikan di lingkungan PP Amanatul Ummah sudah memiliki program unggulan yaitu MA Unggulan di Pacet dan Surabaya, Madrasah Bartaraf Internasional (MBI) dan SMA Unggulan. Perencanaan kebijakan akselerasi, walaupun dilakukan secara demokratis, namun memiliki sifat bias, dimana seluruh pendapat yang pro dan kontra hanya sebagai masukan untuk menentukan alternatif yang terbaik. Dari temuan perencanaan ini menguatkan pendapat Dunn (1999) dimana pada sebuah perencanaan kebijakan harus melakukan langkah yaitu (1) menyusun agenda (merumuskan agenda), (2) formulasi agenda, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan, (5) penilaian kebijakan.<sup>28</sup>

Untuk mendukung perencanaan program akselerasi Madrasah Aliyah PP Amanatul Ummah Pacet melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pemerintah dan swasta. Komunikasi yang dibangun pihak PP. Amanatul Ummah dengan pemerintah meliputi pihak Kementerian Agama RI di Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Program akselerasi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara prosedural-administratif. Keberhasilan komunikasi tidak hanya sebatas organisatoris, melainkan juga dipengaruhi peran kiai sebagai publik figur. Peran publik figur sebagaimana temuan Nur Syam<sup>29</sup> sebagai peran *public relations personal* dimana figur kiai sebagai

<sup>28</sup> William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 24-25

<sup>29</sup> Nur Syam "Kepemimpinan dalam Pengembangan Pondok Pesantren" dalam A. Halim dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 77-78

komunikator, sehingga dalam melakukan komunikasi dengan pejabat, tokoh masyarakat, camat, polsek, kelurahan dan masyarakat sekitar dapat berjalan dengan lancar.

Peran kiai, sebagaimana pendapat Nur Syam memiliki fungsi sebagai mediator, yaitu menjadi penghubung antara kepentingan berbagai segmen (golongan) masyarakat, terutama kelompok elit dengan masyarakat sekaligus sebagai penghubung berbagai kepentingan masyarakat. komunikasi elit berkuasa (kiai) memiliki peran sebagai komunikator utama yang mengelola dan mengendalikan sumber-sumber komunikasi, sekaligus mengatur lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi yang mengalir secara vertikal maupun horisontal.

Elit berkuasa selalu menjalin komunikasi dengan elit masyarakat untuk memperkuat kedudukannya dan mempertahankan *status quo*.<sup>30</sup>

Peran publik figur kiai senada dengan teori elit politik yang dikemukakan oleh Ortega bahwa kebesaran suatu bangsa bergantung kepada kemampuan rakyat, masyarakat umum, kerumunan, masa untuk menemukan simbol dalam memilih orang tertentu. Orang pilihan yang dimaksud adalah orang yang terkenal dan merekalah yang membimbing massa. Elit berkuasa dalam istilah peneliti adalah elit pemerintah (kiai) dan elit masyarakat (camat, lurah, kapolsek). Elit berkuasa merupakan kelompok kecil yang dapat menentukan arah kehidupan negara. Sedangkan elit masyarakat merupakan elit yang dapat mempengaruhi masyarakat lingkungan di dalam mendukung atau menolak segala kebijakan elit berkuasa. Oleh karena itu elit berkuasa sangat berkepentingan untuk menjalin komunikasi dengan elit masyarakat di dalam upaya untuk mewujudkan tujuannya.<sup>31</sup>

Meskipun kiai di PP. Amanatul Ummah sebagai elit berkuasa memiliki peran politik untuk menentukan kebijakan secara pribadi dan organisasi, namun pada praktiknya peran ini jarang dilakukan. Justru lebih banyak menggunakan peranya sebagai mediator baik dalam konteks politik, sosial maupun kultural. Peran-peran ini banyak dilakukan oleh kiai di PP Amanatul Ummah dalam rangka menjalin kerjasama dengan semua pihak. Peran ini bisa berfungsi secara otomatis maupun diperankan. Secara otomatis misalnya peran kyai tidak terlihat secara langsung secara politis. Sedangkan diperankan

---

<sup>30</sup> Ibid,

<sup>31</sup> S.P. Varma., *Teori Politik Modern*. Penyunting Tohir Efendi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 200



yaitu melakukan secara sadar agar tercapai usaha yang diinginkan. Dari kedua peran di atas kiai lebih banyak pada peran yang “diperankan”.

Praktek perencanaan kebijakan program akselerasi di PP Amanatul Ummah Pacet Mojokerto merupakan kombinasi antara model strategis dan model musyawarah. Dikatakan model strategis karena PP Amanatul Ummah dalam melakukan perencanaan kebijakan melalui identifikasi dan pemecahan isu-isu yang menekankan pada penilaian lingkungan di luar dan di dalam organisasi yang berorientasi pada sebuah tindakan. Sedangkan pada praktek yang lain menggunakan model musyawarah (*deliberative*) karena PP Amanatul Ummah merumuskan melalui interaksi intensif di antara para pemangku kepentingan atau *stakeholder*, dimana pada akhirnya kesepakatan diantara mereka yang ditetapkan sebagai kebijakan publik.

Temuan di atas menguatkan teori kebijakan model *deliberative* dimana pada model ini kebijakan membutuhkan keterlibatan semua pihak secara luas. Proses kebijakan sebagai sebuah proses interaksi untuk saling membuat konstruksi atas pemahaman dari sebuah realitas, atau juga membuat konstruksi realitas itu sendiri.<sup>32</sup> Sedangkan pada perencanaan kebijakan menggunakan teori model strategis dari Bryson (2003) tentang perencanaan kebijakan model strategis. Menurut Bryson bahwa proses perumusan kebijakan harus dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yaitu menyepakati proses perencanaan strategis dan menilai kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman. Proses ini melibatkan kegiatan perumusan kebijakan, hasil kebijakan yang diinginkan, manfaat dari kebijakan dan analisis SWOT.<sup>33</sup>

Peran dalam mengambil kebijakan berkenaan dengan program akselerasi lebih banyak pada peran sebagai pemimpin formal dimana tanggungjawab secara jelas sesuai dengan aturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Peran inilah tentu membuat program akselerasi menjadi kurang memiliki citra yang baik. Program akselerasi bisa menjadi program hanya sesaat jika tidak membawa pengaruh yang signifikan pada perkembangan madrasah.

<sup>32</sup> Frank Fisher, *Reframing Public Policy*, (Oxford: university Press, 2003), viii.

<sup>33</sup> Bryson, J. dan W. Roering, *Applying private-sector strategic management in the public sector* dalam *Handbook of Strategic Management*, Jack Rabin, Gerald J. Miller, W. 1987.

Dalam rangka membangun kepercayaan dan tanggungjawab, kepala madrasah dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya harus mampu memberdayakan tenaga kependidikan dan seluruh warga madrasah agar mau dan mampu melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan madrasah. Memberdayakan berarti membuat usaha yang sistematis dan berkesinambungan untuk memberi informasi, pengetahuan, dukungan dan kesempatan kepada para tenaga kependidikan yang lebih banyak guna melatih kekuatan mereka untuk meraih keberhasilan. Tanggung jawab merupakan beban yang harus dipikul dan melekat pada kepala madrasah. Tanggungjawab juga berkenaan dengan resiko yang dihadapi oleh seorang pemimpin, baik berupa sanksi dari atasan atau pihak lain yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan. Tanggungjawab pemimpin harus dibuktikan bahwa kapan saja dia harus siap untuk melaksanakan tugas (*bias of action*), yang harus tetap siaga bila ada perintah. Untuk kepentingan tersebut, dia harus memosisikan diri sebagai seorang pekerja keras (*hard worker*), berdedikasi (*dedicated employer*), dan seorang saudagar (memiliki seribu akal serta mampu memberdayakan dan memengaruhi orang lain secara positif).

### **Implementasi Kebijakan Program Akselerasi di Madrasah Aliyah Amanatul Ummah Pacet Mojokerto**

Kebijakan program akselerasi adalah sebuah kebijakan yang digulirkan pemerintah dalam rangka untuk memfasilitasi anak cerdas dan istimewa. Sebagaimana amanat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan. Penyelenggaraan program akselerasi di MA Amanatul Ummah merupakan sebuah keputusan yang dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita Pondok Pesantren Amanatul Ummah, yaitu terwujudnya manusia unggul utuh dan berakhlakul karimah.

Keputusan untuk mengimplementasikan program akselerasi di PP Amanatul Ummah sebagai program unggulan, kiranya tepat sebagaimana diungkapkan oleh Muhaimin (2011)<sup>34</sup> bahwa untuk menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas harus melakukan strategi (1) Membangun berbagai kekuatan madrasah, (2) Memperkuat

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 105-112.

leadership bagi madrasah dan manajemen sekolah. (3) Membangun pencitraan (*image building*), (4) Membangun program-program unggulan, (5) Mengubah mindset atau cara berfikir umat Islam, (6) Perlunya pengembangan pendidikan Islam di era globalisasi untuk menerapkan empat strategi yaitu: *pertama*, strategi substantif, yakni lembaga pendidikan Islam perlu menyajikan program-program komprehensif. *Kedua*, strategi *bottom up* yakni lembaga pendidikan Islam harus tumbuh dan berkembang dari bawah. *Ketiga*, strategi *deregulatory*, yakni tidak terlalu terikat pada ketentuan-ketentuan baku yang terlalu sentralistik dan mengikat, dalam arti diperlukan keberanian untuk melakukan pengembangan. *Keempat*, strategi *cooperative*, yakni mengembangkan jaringan kerjasama, baik sesama lembaga pendidikan Islam atau yang lainnya, baik tingkat nasional, regional maupun internasional.

Tenaga pendidik sangatlah penting pada program akselerasi, sebab keberhasilan pembelajaran bagi siswa cerdas istimewa sangatlah ditentukan oleh tenaga pendidik. Setidaknya tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi S1, tidak hanya memiliki kompetensi akademik, sosial, kepribadian dan pedagogik. Namun harus memiliki pengetahuan tentang sifat dan kebutuhan anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa, memiliki ketrampilan berpikir tingkat tinggi. Sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional bagi kelas akselerasi.

Dalam sistem perekrutan tenaga pendidik yang dilakukan oleh MA Akselerasi berbeda dengan lembaga lain. Keunikan dalam perekrutan tenaga pendidik yaitu : *pertama*, guru harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengajar. Alasannya adalah karena lokasi MA Akselerasi sangat jauh dengan perkotaan dan membutuhkan guru untuk bermukim di Pesantren. *Kedua*, memiliki kemampuan pemahaman tentang *ablisunnah wal jama`ah*. Pemahaman ini tentu tidak hanya secara lisan, namun mampu mempraktikan amalan *ablisunnah wal jamaah* dalam ubudiyah.<sup>35</sup> Pada persyaratan kedua nampak jelas ada sistem ideologis yang dilakukan oleh pihak Pesantren Amanatul Ummah yaitu penanaman nilai-nilai *abli sunnah wal jama`ah*. Nilai-nilai ini harus dimiliki oleh semua guru, sebab PP Amanatul Ummah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbasis pada nilai-nilai tersebut.

<sup>35</sup> Dokumen, Profil PP Amanatul Ummah 2015

Meskipun demikian minat masyarakat terhadap program akselerasi mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Bahkan kelulusan MA Program Akselerasi mampu menembus perguruan tinggi negeri favorit melalui jalur beasiswa. Keberhasilan program akselerasi ini tentu dipengaruhi banyak faktor diantaranya : *Pertama*, publikasi yang dilakukan oleh pihak pesantren melalui media yaitu cetak, elektronik. *Kedua*, melalui lulusan dan alumni pendidikan. *Ketiga*, personal kiai melalui *human relation*, baik secara pribadi maupun secara organisatoris.

*Pertama*, publikasi melalui media baik yang dilakukan oleh lembaga internal pesantren, kiai, guru dan siswa untuk membangun citra. Publikasi ini dilakukan melalui media berupa profil dan lulusan visi, misi PP Amanatul Ummah dan seluruh instansi yang didalamnya. Publikasi yang dilakukan setidaknya mampu membangun citra yang diharapkan yaitu sebagai lembaga pendidikan unggul. Publikasi yang dilakukan sebagai usaha untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang keunggulan dan kualitas pendidikan di MA program akselerasi. Temuan penelitian ini menguatkan teori pencitraan Frank Jefkins (2003) sebagai *wish image* (citra yang diharapkan) yaitu suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen atau organisasi. Citra yang diharapkan biasanya dirumuskan dan diterapkan untuk suatu yang relatif baru, ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai mengenainya.

*Kedua*, *public figure* kiai. Sebagaimana temuan peneliti bahwa penyelenggaraan MA program akselerasi di PP Amanatul Ummah merupakan rangkaian dalam membangun citra madrasah. Disadari atau tidak bahwa dengan munculnya program akselerasi ternyata mampu menaikkan nama PP Amanatul Ummah sebagai lembaga yang diminati oleh masyarakat. Citra sebagaimana pendapat Soemirat merupakan kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap institusi, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau organisasi. Dalam konteks penelitian, citra yang dimaksud adalah serangkaian kerja yang sengaja diciptakan oleh organisasi dalam rangka untuk memberi kesan kepada masyarakat. Kesan yang dibangun oleh PP Amanatul Ummah citra bayangan (*mirror image*) yang diperoleh dari sosok pimpinan lembaga dalam hal ini adalah figur publik. Temuan ini juga menguatkan pendapat Frank Jefkins (2003) tentang *mirror image* bahwa citra yang melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi biasanya melalui pemimpinnya yaitu

mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya.<sup>36</sup> Dalam kalimat lain citra bayangan (*mirror image*) adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Meskipun citra ini seringkali kurang tepat, bahkan bisa dikatakan sebagai ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi mengenai pandangan dan pendapat pihak-pihak luar.

Meskipun pencitraan itu muncul sebagai akibat dari pandangan luar, tetapi pencitraan juga melekat pada seorang publik figur (kiai). Keberadaan kiai di PP Amanatul Ummah memiliki peran yang strategis dalam aspek politik Indonesia khususnya di Jawa Timur, sehingga peran ini mampu membawa citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul. Karenanya reputasi sebuah organisasi banyak ditentukan oleh pejabat senior pada saat mereka diposisi puncak. Pendapat ini menguatkan pendapat Scott M. Cutlip (2009) yang mengatakan bahwa reputasi publik terhadap organisasi pada dasarnya banyak berasal dari perilaku pejabat senior pada saat mereka diposisi puncak.<sup>37</sup> Ketika pimpinan (kiai) bertindak dan berbicara maka berlangsunglah interpretasi dan gema yang diciptakan oleh figure tersebut. Sehingga mau tidak mau, pimpinan terikat pada fungsi *public figure*.

Sementara pada aspek kepemimpinan, kiai memiliki keistimewaan karena sosok kiai sebagai orang yang alim dan memiliki keajaiban-keajaiban yang dianggap sebagai berkah. Sehingga apapun keputusan kiai tidak ada yang berani untuk menolak. Demikian juga yang terjadi di PP Amanatul Ummah bahwa penyelenggaraan program akselerasi semua pihak tidak ada yang berani untuk menolak gagasan dan ide dari kiai. Fenomena kepemimpinan ini sebagaimana pendapat Mas'ud<sup>38</sup> bahwa kepemimpinan kiai dipercaya sebagai berkah atau barakah yang didasarkan atas doktrin keistimewaan status seorang alim dan wali. Sehingga apapun yang diputuskan oleh kiai merupakan doktrin berkah yang harus diterima oleh semua pihak di lembaga PP Amanatul Ummah. Temuan penelitian juga memperkuat temuan Arifin bahwa kiai lebih banyak dibentuk oleh pola kepemimpinannya di pondok pesantren. Salah satu konsep yang sangat

<sup>36</sup> Frank Jefkins, *Public Relations*. (Jakarta: Erlangga, 2003), 50

<sup>37</sup> Cutlip M Scott, *Effective Public Relation*, edisi kesembilan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 67.

<sup>38</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren, Perbelatan Agama dan Tradisi* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 77.

penting adalah konsep animis pantheistik yaitu penghormatan oleh masyarakat kepada kiai yang disebabkan masyarakat mempraktikkan kepercayaan agama terdahulu atau agama pertama kali datang ke nusantara sebelum Islam, yang mengarah pada pengkultusan para kiai yang dianggap sebagai "dewa" atau "manusia super".<sup>39</sup>

*Ketiga, lulusan (output).* Tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan suatu organisasi karena reputasi lulusan, dalam konteks penelitian ini adalah lulusan MA program Akselerasi dapat bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan yang setingkat. Reputasi ini secara tidak langsung mampu membawa PP Amanatul Ummah sebagai lembaga unggul. Keberhasilan menembus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorite merupakan bukti kualitas pendidikan di MA Akselerasi. Dalam waktu tujuh tahun MA Akselerasi PP Amanatul Ummah di Pacet sudah mampu menembus perguruan tinggi dengan nilai yang memuaskan melalui jalur beasiswa. Temuan penelitian ini menguatkan pendapat Muhaimin (2011) bahwa sekolah yang unggul salah satu tolok ukurnya adalah memiliki nilai akademik yang baik. Temuan ini juga mengafirmasi pendapat Fantini (1986) bahwa untuk menilai kualitas pendidikan melalui empat dimensi yaitu individu murid, kurikulum, guru, dan lulusan dari suatu proses pendidikan.<sup>40</sup>

### **Evaluasi Kebijakan Program Akselerasi di Madrasah Aliyah Amanatul Ummah Pacet Mojokerto**

Evaluasi kebijakan MA program akselerasi di Pacet dapat dikategorikan dua tahap yaitu: *Pertama*, pihak internal yang terdiri dari yayasan, kepala madrasah, koordinator MA Akselerasi. Yayasan memiliki peran yang sangat penting, sebab secara struktural keberadaan yayasan sebagai otoritas puncak di lembaga Amanatul Ummah. Selain itu, yayasan memiliki kewenangan penuh terhadap jalannya lembaga di PP Amanatul Ummah. Oleh karenanya, keberhasilan program adalah ditentukan oleh pihak yayasan dalam mengelola dan mengarahkan semua elemen organisasi untuk mencapai tujuan. Kepala madrasah merupakan tangan kanan dari otoritas yayasan. Peran kepala madrasah hanya sebatas pada pengelolaan di madrasah dan tidak memiliki kewenangan secara penuh. Meskipun yayasan tidak bisa melakukan pengelolaan secara

<sup>39</sup> Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kyai (Kasus Pondok Pesantren Tebuireng)* (Malang: Kalimasada Press. 2003), 85.

<sup>40</sup> Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi*, 105-112.

langsung dan membutuhkan peran-peran yang lain. Sementara itu, koordinator Madrasah Aliyah Program Akselerasi hanya memiliki kewenangan sebatas pada sifat koordinasi.

*Kedua*, evaluasi eksternal yaitu dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur dan Kemenag Kabupaten Mojokerto. Evaluasi hanya bersifat struktural administratif yang bersifat konsultatif. Pihak Kemenag Wilayah Jawa Timur hanya melakukan evaluasi pada aspek (1) kesesuaian kurikulum di MA program akselerasi dengan peraturan pemerintah yang menetapkan kurikulum akselerasi, baik pada isi, materi dan muatan kurikulum. (2) Input-proses-output siswa yaitu pada sistem penerimaan siswa baru dengan menggunakan standar atau ketentuan yang telah ditetapkan dan sistem kelulusan siswa yaitu hasil yang dicapai oleh program akselerasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan program akselerasi yang dilakukan oleh pihak MA Amanatul Ummah Mojokerto mengikuti model terpadu antara tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) dengan tipe evaluasi proses (*proses of public policy implementation*). Kedua model evaluasi diterapkan dengan dibuktikan adanya evaluasi hasil dengan menitik beratkan pada hasil lulusan kedua lembaga. Evaluasi hasil dilakukan secara rutin yaitu pada tahap ujian semester, baik ujian tengah semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) maupun Ujian Nasional (UN). Pada evaluasi ini dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Sedangkan pada tipe evaluasi proses, merupakan wewenang dari internal yaitu pihak yayasan, kepala madrasah, dan koordinator. Evaluasi internal bersifat menyeluruh yaitu berkenaan dengan manajemen, pembelajaran, pembiayaan, rekrutmen guru, rekrutmen siswa. Keseluruhan evaluasi sebagai bahan untuk melakukan perbaikan selama proses berlangsungnya program akselerasi di MA Amanatul Ummah Pacet Mojokerto.

## Penutup

Perencanaan kebijakan program Akselerasi di MA Amanatul Ummah dan MAN Mojokerto dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi dan konsultasi. Bentuk sosialisasi yaitu melakukan rapat internal sekolah dengan pihak yayasan dan seluruh *stakeholders*. Perencanaan yang dilakukan yaitu (1) melakukan koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan pihak swasta dan pemerintah. (2) membentuk tim kecil program akselerasi. Model perencanaan ini lebih dekat dengan model *deliberative* yaitu untuk memastikan bahwa kebijakan publik

merupakan pilihan keputusan dari publik diperlukan pembuatan keputusan yang melibatkan masyarakat secara luas. Selain itu untuk menentukan keberhasilan program dengan membuat perencanaan strategis (*strategic planning*) melalui analisis kekuatan dan kelemahan dengan menggunakan analisis SWOT. Keduanya memiliki publik figur yang berbeda, kepala MAN Mojosari memiliki peran sebagai inisiator yang bersifat administratif. Sedangkan peran yayasan di MA Amanatul Ummah Pacet bersifat lebih luas karena memiliki kewenangan penuh, yang mampu berperan sebagai inisiator, mediator, komunikator, politisi dan sosial.

Implementasi kebijakan program akselerasi di MA Amanatul Ummah Pacet dan MAN Mojosari dilakukan melalui tahap (1) penunjukkan tim implementasi program; (2) melakukan pelatihan; (3) sosialisasi publik dan (4) melakukan perbaikan terhadap kebijakan. Keberhasilan program MA Amanatul Ummah didukung sistem perekrutan siswa yang ketat untuk masuk dikelas akselerasi. Didukung pola SQ (*spiritual question*) melalui shalat tahajud dan penguatan nilai-nilai *salafus shaleh* sebagai model pengembangan karakter dan motivasi terhadap keberhasilan siswa. Munculnya pola *building image* melalui program akselerasi sebagai *brand* lembaga, yang diperankan oleh kiai sebagai *public figure*. Sedangkan di MAN *brand* madrasah sebagai lembaga negeri lebih kuat namun kurang ada penguatan terhadap program akselerasi. Kurangnya keberanian lembaga negeri untuk lepas dari ketentuan-ketentuan baku yang terlalu sentralistik.

Evaluasi kebijakan program akselerasi di MA Amanatul Ummah dan MAN Mojosari dilakukan melalui pihak eksternal dan internal. menggunakan evaluasi dengan tipe valuasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) dengan tipe evaluasi proses (*proses of public policy implementation*). Peran pihak eksternal merupakan bagian dari garis vertikal organisatoris yaitu Kementerian Agama Tingkat Pusat, Wilayah dan Kabupaten yang memiliki tugas untuk mengawasi program. Sedangkan pihak internal yaitu yayasan, kepala madrasah dan koordinator yang langsung melakukan evaluasi di lapangan.

### Daftar Rujukan

- Abdul Wahab, Sholichin, *Analisa Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksra. 2014.
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Suara Bebas. 2006.



- Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kyai (Kasus Pondok Pesantren Tebuireng)*. Malang: Kalimasada Press. 2003.
- Baska, Joy Van Tassel *Comprehensive Curriculum for Gifted Learner*, (Waco Texas: Prufock Press Inc, 2006.
- Bryson John M, *Strategis Planning for Public and Nonprofit Organizations: A guide to Strengthening and Sustaining Organization Achievement*. Sanfransisco: Jossey Bass. 1995.
- Carol Ann Tomlinson. *Leadership for Differentiating School & Classrooms*. Alexandria: ASCD 2000.
- Davis, G. A. & Rimm, S. B *Gifted Children and Gifted Education: a handbook for teachers and parents*. Arizona: Great Potential Press. 2006.
- Davis, G. A. & Rimm, S. B.. *Education of The Gifted and Talented, 4th ed*. Boston: Allyn & Bacon. 1998.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.2003.
- Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik: perumusan, implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media. Gramedia. 2003.
- Dye, Thomas R *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall. 2011.
- Etzioni, Amitai, *Mixed Scanning: A Third Approach to Decision Making*, *Public Administration Review*. 1967.
- Etzioni, Amitai. *Active Society: A Theory of Societal and Political Process*, New York: Free Press. 1968.
- Eyestone,Robert.*The Thread of Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril. 1971.
- Fattah, Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013
- Fisher, Frank, *Reframing Public Policy*, Oxford: University Press, 2003.
- Gregory J.C. *Handbook of educational Policy*, San Diego: Acedmic Press, 2001.
- Hidayat, Ara & Machali, Imam. *Pengelolaan Pendidikan*, Yogyakarta: Kaukaba. 2012
- Irianto, Yoyon Batiar, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*, Jakarta: RajawaliPress. 2012.
- Islamy, M Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

- J.Bryson dan W. Roering, *Applying private-sector strategic management in the public sector* dalam Handbook of Strategic Management, Jack Rabin, Gerald J. Miller, W. 1987.
- Joan F Smutny, *Designing and Developing Programs for Gifted Students*. California: Corwin Press, 2000.
- John Schermerhorn, et.al, *Managing Organizational Behavior*, by John Wiley & Sons, Inc Printed in The United State of America. 1982.
- Karen, Roger *Effects of Acceleration on Gifted Learner*. Waco. Texas : prufrock Press. 2002.
- Karen, Roger *Re-forming Gifted Education*, Scottsdale: Great Potential Press. 2002.
- Kolesnik, WB, *Educational Psychology*. Second edition. (New York: McGraw Hill Book Company. 1970.
- Lester, James P and J Stewart, *Public Policy: An Evaluation Approach*. The University of California: Wadsworth Thomson Learning. 2000.
- Majir, Abdul "Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum ekstra kurikuler berbasis budaya lokal : Studi multi kasus pada SMK Negeri 1 Labuan Bajo, SMK Stella Maris Labuan Bajo dan SMK Negeri Datak Kabupaten Manggarai Barat NTI" Disertasi--UNM, Malang, 2014.
- Maker J. *Teaching Models in Education of gifted*. Texas: Pro-ed. 1995.
- Meier, *The Accelerated Learning Handbook*. The McGraw-Hill Companies. 2000.
- Muhaimin, *Manajemen Pendidikan : Aplikasinya dalam Penyusunan RKS/M*, Jakarta: Prenada Media. 2010.
- Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja grafindo Persada. 2011.
- Munadi, Muhammad & Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media. 2011.
- Mustiningsih, "Implementasi Pembuatan Keputusan Berbasis Budaya Organisasi: Studi multi kasus pada Dinas Pendidikan Islam Al-Multazam Mojokerto dan Sekolah Polisi Negera Mojokerto" Disertasi--UNM, Malang, 2011.
- Nugroho, Riant, *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Gramedia. 2014.

- Nur Syam “Kepemimpinan dalam Pengembangan Pondok Pesantren” dalam A. Halim dkk, *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Parsons, Wayne, *PUBLIC POLICY Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Terjemahan Tri Wibowo B. S. Jakarta : Kencana, 2006.
- Patton V. Carl dan Sawucki S. David. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New Jersey: Prentice-Hall. 1986.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Arruz Media.2011.
- Supriyanto,Eko.*Pengembangan Kurikulum Pendidikan Cerdas Istimewa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Suryadi, Ace dan HAR Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 2012.
- Swardani,Ni Putu “Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf International: Studi multisitus pada tiga Sekolah Menengah Atas Negeri di Bali”Disertasi--UNM, Malang, 2009.
- Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta.2008.
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahanya*, Rajawali Press: Jakarta. 2011.
- Widodo, Joko. *Analisi Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing. 2013.
- Wijayanti,Wiwik “Implementasi kebijakan SD-SMP Satu Atap : studi multisitus di Kecamatan Ngablak, Pakis dan Sawangan Kabupaten Magelang”Disertasi--UNM, Malang, 2011.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan